

LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI PENGGUNA
ANGGARAN BA. 018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2023

BPSIP KALIMANTAN SELATAN

(Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023)



Jl. Panglima Batur Barat No.4 P.O Box 1032 Banjarbaru 70714

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan Laporan	iv
I Laporan Realisasi Anggaran	1
II Neraca	2
III Laporan Operasional	3
IV Laporan Perubahan Ekuitas	4
V Catatan Atas Laporan Keuangan	5
A. Penjelasan Umum	5
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis	5
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	5
A.3. Basis Akuntansi	5
A.4. Dasar Pengukuran	5
A.5. Kebijakan Akuntansi	6
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	11
B.1. Pendapatan	11
B.2. Belanja	12
B.2.1. Belanja Pegawai	13
B.2.2. Belanja Barang	13
B.2.3. Belanja Modal	14
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	16
C.1. Kas Lainnya dan Setara Kas	16
C.2. Persediaan	16
C.3. Tanah	16
C.4. Peralatan dan Mesin	16
C.5. Gedung dan Bangunan	17
C.6. Jalan, Irigasi dan Jaringan	18
C.7. Aset Tetap Lainnya	18
C.8. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	18
C.9. Aset Tak Berwujud	19
C.10. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	19
C.11. Utang kepada Pihak Ketiga	19
C.12. Ekuitas	20
D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	21
D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak	21
D.2. Beban Pegawai	21
D.3. Beban Persediaan	22
D.4. Beban Barang dan Jasa	22
D.5. Beban Pemeliharaan	23

D.6	Beban Perjalanan Dinas	23
D.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	23
D.8	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	24
D.9	Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	24
E.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	25
E.1.	Ekuitas Awal	25
E.2.	Surplus (Defisit) LO	25
E.3.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	25
E.4.	Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	25
E.5.	Transaksi Antar Entitas	25
E.6.	Ekuitas Akhir	25
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	26
VI.	Lampiran dan Daftar	27

Laporan Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Selatan selaku BPSIP Kalimantan Selatan Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp138.924.778 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp138.924.778 atau mencapai 112,67 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp123.300.000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp9.202.528.617 atau mencapai 96,83 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp9.503.321.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2023 . Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp130.244.771.562 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp15.006.626; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp130.229.764.936 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp2.500.000 dan Rp130.242.271.562

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp136.349.772 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp8.786.611.342 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp-8.650.261.570, Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp-66.879.994 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-8.717.141.564.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 sebesar Rp129.880.904.587, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-8.717.141.564 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi sebesar 14.904.700 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 9.063.603.839 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp130.242.271.562

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajarkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	Catatan	TA 2023		% thd Angg	TA 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN DAN HIBAH	B.1.				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1.	123.300.000	138.924.778	112,67	248.115.804
JUMLAH PENDAPATAN		123.300.000	138.924.778	112,67	248.115.804
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.2.1.	4.041.821.000	3.962.459.815	98,04	4.875.652.988
Belanja Barang	B.2.2.	4.354.450.000	4.134.305.460	94,94	4.154.666.950
Belanja Modal	B.2.3.	1.107.050.000	1.105.763.342	99,88	119.950.000
Belanja Bantuan Sosial	B.2.4.	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		9.503.321.000	9.202.528.617	96,83	9.150.269.938

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN

NERACA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

U R A I A N	Catatan	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.	1.936.626	1.936.626
Persediaan	C.2.	13.070.000	85.125.000
Jumlah Aset Lancar		15.006.626	87.061.626
ASET TETAP			
Tanah	C.3.	108.622.116.915	108.622.116.915
Peralatan dan Mesin	C.4.	12.867.080.078	12.195.530.078
Gedung dan Bangunan	C.5.	19.260.926.912	19.043.919.990
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.6.	5.012.037.020	4.794.830.600
Aset Tetap Lainnya	C.7.	98.082.767	98.082.767
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.8.	(15.630.478.756)	(14.958.137.389)
Jumlah Aset Tetap		130.229.764.936	129.796.342.961
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.9.	13.372.790	19.487.790
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.10.	(13.372.790)	(19.487.790)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		130.244.771.562	129.883.404.587
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.11.	2.500.000	2.500.000
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		2.500.000	2.500.000
JUMLAH KEWAJIBAN		2.500.000	2.500.000
EKUITAS			
Ekuitas	C.12.	130.242.271.562	129.880.904.587
JUMLAH EKUTAS		130.242.271.562	129.880.904.587
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		130.244.771.562	129.883.404.587

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	136.349.772	248.115.804
Jumlah Pendapatan		136.349.772	248.115.804
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	3.962.459.815	4.875.652.988
Beban Persediaan	D.3	169.209.290	790.736.000
Beban Barang dan Jasa	D.4	2.493.622.780	1.945.662.700
Beban Pemeliharaan	D.5	590.967.040	564.836.450
Beban Perjalanan Dinas	D.6	898.011.050	855.232.800
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	672.341.367	1.484.211.216
Jumlah Beban		8.786.611.342	10.516.332.154
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(8.650.261.570)	(10.268.216.350)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.8	(159.570.000)	(88.677.500)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9	92.690.006	87.061.626
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		(66.879.994)	(1.615.874)
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(8.717.141.564)	(10.269.832.224)
Pos Luar Biasa			
Pendapatan PNBPN		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
		-	-
SURPLUS/DEFISIT - LO		(8.717.141.564)	(10.269.832.224)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN****LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS****UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022***(Dalam Rupiah)*

URAIAN	Catatan	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1.	129.880.904.587	131.251.150.018
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	(8.717.141.564)	(10.269.832.224)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4.	14.904.700	(2.431.715)
Penyesuaian Nilai Aset		-	-
Koreksi Nilai Persediaan		-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi		-	-
Selisih Revaluasi Aset		-	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi		14.904.700	(2.431.715)
Koreksi Lain-Lain		-	-
Jumlah		14.904.700	(2.431.715)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5.	9.063.603.839	8.900.217.508
KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS		361.366.975	(1.372.046.431)
EKUITAS AKHIR	E.6.	130.242.271.562	129.879.103.587

A. PENJELASAN UMUM

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KANTOR WILAYAH AKUNTANSI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Akuntansi Provinsi Kalimantan Selatan

Sesuai dengan Permentan Nomor 16 Tahun 2006 tugas dan fungsi (Tusi) BPSIP adalah melaksanakan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi spesifik lokasi. Sebagai UPT Pusat di daerah, BPSIP Kalimantan Selatan juga bertugas melakukan pendampingan program strategis Kemtan yang cenderung meningkat dan hampir keseluruhan program tersebut diimplementasikan di wilayah kerja BPSIP Kalimantan Selatan. Selain itu juga BPSIP Kalimantan Selatan mengemban tugas administratif sebagai Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang dan Wilayah. Dalam upaya peningkatan efisiensi tupoksi, diperlukan koordinasi dan sinergi program dan kegiatan BPSIP dengan seluruh UK/UPT lingkup BSIP agar lebih berdaya guna. Pendayagunaan unit kerja didasarkan pada potensi yang tersedia, baik sumberdaya manusia, sarana/prasarana, dan anggaran yang tersedia.

Dilihat dari sumberdaya manusia, jumlah SDM BPSIP Kalimantan Selatan sebanyak 49 PNS dan 3 PPPK. Menurut tingkat jabatan SDM BPSIP Kalimantan Selatan terdiri dari 2 (dua) orang Pejabat Struktural, 22 (sembilan belas) orang Pejabat Fungsional Khusus, dan 29 (dua puluh sembilan) orang dengan Jabatan Fungsional Umum. Laporan Keuangan Semester 2 Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Selatan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPSIP Kalimantan Selatan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui MONSAKTI yang merupakan aplikasi yang digunakan untuk monitoring interkoneksi, rekonsiliasi, dan penyusunan Laporan Keuangan.

Data yang ditampilkan dan diolah MONSAKTI berasal data SAKTI didukung data SPAN dan data aplikasi lain yang terkait. MONSAKTI dikembangkan selain untuk memenuhi kebutuhan para pengguna SAKTI, juga dalam rangka menjaga performance SAKTI dengan memisahkan fungsi data transaksional (OLTP) dan data pelaporan (OLAP). Pada MONSAKTI terdapat beberapa fitur yang tersedia, di antaranya To Do List, Monitoring, Rekonsiliasi, Laporan (LK & LBMN), Daftar/Rincian, Validitas Data, Download Data Detail, dan Tematik.

Basis Akuntansi

A.3. BASIS AKUNTANSI

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian yang merupakan entitas pelaporan dari BPSIP Kalimantan Selatan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan	
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. 2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. 2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - * harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - * harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - * harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp138.924.778 atau mencapai 112,67 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp123.300.000. Pendapatan BPSIP Kalimantan Selatan terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp138.924.778 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2023		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Negara Bukan Pajak	123.300.000	138.924.778	112,67
Jumlah	123.300.000	138.924.778	112,67

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami penurunan sebesar 44,01 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan Semester II TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	138.924.778	248.115.804	(44,01)
Jumlah	138.924.778	248.115.804	(44,01)

B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing- masing sebesar Rp138.924.778 dan Rp248.115.804. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2023 mengalami penurunan sebesar 44,01 dari TA 2022 disebabkan penjualan hasil pertanian hasil samping penjualan Gabah Konsumsi TAYL Kab. Tanah Laut Kegiatan UPBS di TA sebelumnya lebih besar dibandingkan penjualan di TA berjalan. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Semester II TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	138.924.778	248.115.804	(44,01)
Jumlah	138.924.778	248.115.804	(44,01)

Sedangkan Rincian PNBPN Lainnya adalah sebagai berikut :

Perbandingan PNBPN Lainnya Semester II TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	1.590.000	4.080.000	(61,03)
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	-	5.000.000	(100,00)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	7.614.372	8.186.304	(6,99)
Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	-	2.200.000	(100,00)
Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek	127.145.400	228.649.500	(44,39)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	2.575.006	-	-
Jumlah	138.924.778	248.115.804	(44,01)

Realisasi PNBPN pada LRA senilai Rp 138.924.778 berbeda dengan LO senilai Rp 136.349.772. Terjadi selisih senilai Rp 2.575.006 disebabkan pada pencatatan di LRA akun 425911 Pendapatan Kembali Belanja Pegawai TAYL dimasukkan dalam menu PNBPN, sedangkan pada pencatatan di LO akun tersebut masuk pada menu Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sehingga selisih tersebut hanya disebabkan perbedaan pada menu pencatatan saja.

Realisasi Belanja
Rp9.202.528.617

B.2 Belanja

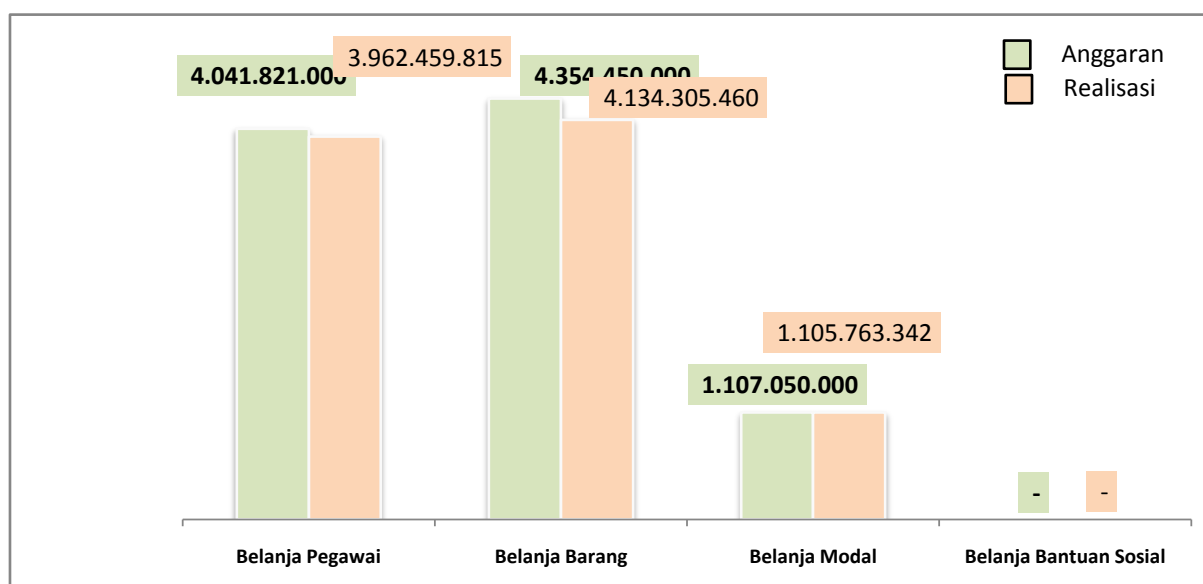
Realisasi Belanja pada TA 2023 adalah sebesar Rp9.202.528.617 atau 96,83 % dari anggaran belanja sebesar Rp.9.503.321.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester II TA 2023

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	4.041.821.000	3.962.459.815	98,04
Belanja Barang	4.354.450.000	4.134.305.460	94,94
Belanja Modal	1.107.050.000	1.105.763.342	99,88
Jumlah	9.503.321.000	9.202.528.617	96,83

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2023



Dibandingkan dengan TA 2022, Realisasi Belanja TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,57% . Berikut rincian realisasi belanja TA 2023 dan TA 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Semester II TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Pegawai	3.962.459.815	4.875.652.988	(18,73)
Belanja Barang	4.134.305.460	4.154.666.950	(0,49)
Belanja Modal	1.105.763.342	119.950.000	821,85
Jumlah	9.202.528.617	9.150.269.938	0,57

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.962.459.815 dan Rp4.875.652.988. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 mengalami penurunan sebesar 18,73 % dari TA 2022. Hal ini disebabkan disebabkan adanya beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memasuki Masa Pensiun sehingga pada TA berjalan beban gaji lebih rendah dibandingkan TA sebelumnya.

Perbandingan Belanja Pegawai Semester II TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Gaji Pokok PNS	2.587.595.900	3.196.026.300	(19,04)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	37.268	46.355	(19,60)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	212.838.980	249.823.930	(14,80)
Belanja Tunj. Anak PNS	55.434.614	61.733.770	(10,20)
Belanja Tunj. Struktural PNS	13.860.000	25.200.000	(45,00)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	236.070.000	399.660.000	(40,93)
Belanja Tunj. PPh PNS	13.677.187	22.436.046	(39,04)
Belanja Tunj. Beras PNS	150.488.760	174.314.940	(13,67)
Belanja Uang Makan PNS	362.472.000	444.160.000	(18,39)
Belanja Tunjangan Umum PNS	78.295.000	90.075.000	(13,08)
Belanja Gaji Pokok PPPK	34.320.800	-	-
Jumlah Belanja kotor	3.964.980.369	4.877.568.341	(18,71)
Pengembalian Belanja Pegawai	2.520.554	1.915.353	31,60
Jumlah Belanja	3.962.459.815	4.875.652.988	(18,73)

Tidak ada perbedaan realisasi belanja pegawai pada pencatatan di LRA dengan LO, total belanja pegawai di Tahun 2023 sebesar Rp 3.962.459.815.

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4.134.305.460 dan Rp4.154.666.950. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami penurunan sebesar 0,49% dari Realisasi TA 2022.

Tidak ada terlalu banyak perbandingan realisasi antara TA berjalan dengan TA sebelumnya.

Perbandingan Belanja Barang Semester II TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Barang Operasional	1.374.373.030	1.215.375.900	13,08
Belanja Barang Non Operasional	783.199.100	441.991.400	77,20
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	157.229.290	778.736.000	(79,81)
Belanja Jasa	318.545.950	286.494.400	11,19
Belanja Pemeliharaan	602.947.040	576.836.450	4,53
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	898.011.050	855.232.800	5,00
Jumlah Belanja	4.134.305.460	4.154.666.950	(0,49)

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.105.763.342 dan Rp119.950.000. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 821,85% dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh Anggaran Belanja Modal TA 2023 lebih besar dibanding TA sebelumnya, sehingga realisasi di tahun berjalan lebih tinggi.

Perbandingan Belanja Modal Semester II TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	671.550.000	93.000.000	622,10
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	217.006.922	26.950.000	705,22
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	217.206.420	-	-
Jumlah Belanja Kotor	1.105.763.342	119.950.000	821,85
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	1.105.763.342	119.950.000	821,85

B.2.3.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp671.550.000 dan Rp93.000.000, mengalami kenaikan sebesar 622,10 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Kenaikan realisasi belanja modal peralatan dan mesin pada TA berjalan berupa barang laboratorium.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester II TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	671.550.000	93.000.000	622,10
Jumlah Belanja	671.550.000	93.000.000	622,10

B.2.3.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp217.006.922 dan Rp26.950.000 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 705,22% dibandingkan Realisasi TA 2022. Kenaikan realisasi belanja modal gedung dan bangunan pada TA berjalan berupa rehab pagar di IP2TP Banjarbaru.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Semester II TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	199.502.222	26.950.000	640,27
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan	17.504.700	-	-
Jumlah Belanja Kotor	217.006.922	26.950.000	705,22
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	217.006.922	26.950.000	705,22

B.2.3.3. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp217.206.420 dan Rp0, mengalami kenaikan sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Semester II TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	199.701.720	-	-
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	17.504.700	-	-
Jumlah Belanja Kotor	217.206.420	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	217.206.420	-	-

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp1.936.626

C.1. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.936.626 dan Rp1.936.626. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP sementara setara kas adalah investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Kas Lainnya dan Setara Kas Semester II TA 2023 dan 2022

Keterangan	TAHUN 2023	TAHUN 2022
Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	1.936.626,00	1.936.626,00
Jumlah	1.936.626	1.936.626

Penjelasan tentang Kas Lainnya dan Setara Kas :

berupa dana Hibah TA sebelumnya yang telah disetorkan tetapi masih tercatat di Neraca Rp 1.936.626

Persediaan Rp13.070.000

C.2. Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp13.070.000 dan Rp85.125.000. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Semester II TA 2023 dan 2022

Jenis	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	13.070.000	-
Bahan Baku	-	85.125.000
Jumlah	13.070.000	85.125.000

Penjelasan tentang Persediaan :

Persediaan tersebut di atas Merupakan persediaan UPBS

Tanah Rp108.622.116.915

C.3. Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp108.622.116.915 dan Rp108.622.116.915. Nilai Tanah tersebut . Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	108.622.116.915
Mutasi tambah :	
Mutasi kurang :	
Saldo per 31 Desember 2023	108.622.116.915

Peralatan dan Mesin Rp12.867.080.078

C.4. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp12.867.080.078 dan Rp12.195.530.078. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	12.195.530.078
Mutasi tambah:	
Pembelian	671.550.000
Reklasifikasi Masuk	5.200.000
Perolehan Lainnya	2.600.000
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi Keluar	5.200.000
Koreksi Pencatatan	2.600.000
Saldo per 31 Desember 2023	12.867.080.078
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(11.493.891.469)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	1.373.188.609

Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa:

1. Alat Laboratorium Pertanian Lainnya (Alat Pengolahan Pertanian) sebanyak 2 buah dengan total nilai Rp 9.050.000
2. Lux Meter (Alat Laboratorium Cahaya, Optik Dan Akustik) sebanyak 1 buah dengan nilai Rp 4.200.000
3. Mikroskop Dengan Camera sebanyak 1 buah dengan nilai Rp 8.500.000
4. Lemari Es sebanyak 1 buah dengan nilai Rp 15.800.000
5. Sieve Shaker Machine (Mesin Ayakan) Electric Timer sebanyak 1 buah dengan nilai Rp 19.000.000
6. Meja kemurnian pembenihan fullset multiplex sebanyak 2 buah dengan total nilai Rp 16.400.000
7. Dinolite Mikroskop Tipe AF3113T sebanyak 1 buah dengan nilai Rp 10.000.000
8. Egg Yolk Colour Fan (15 warna) sebanyak 1 buah dengan nilai Rp 3.500.000
9. Cawan Sampel Aluminium 55 mm sebanyak 2 buah dengan total nilai Rp 2.600.000
10. Oven Gas Portable Aluminium sebanyak 1 buah dengan nilai Rp 1.950.000
11. PHILIPS HR2223 Blender Series 5000 sebanyak 1 buah dengan nilai Rp 1.500.000
12. IWAKI Measuring cylinder/gelas ukur 50 ml sebanyak 2 buah dengan total nilai Rp 3.000.000
13. IWAKI Tabung Reaksi ukuran 16x150 mm sebanyak 1 buah dengan nilai Rp 1.450.000
14. Philips Food Processor Hr7310 sebanyak 1 buah dengan nilai Rp 2.250.000
15. Timbangan Alanitik 4 Digit Ohaus Tipe-PR.224 sebanyak 2 buah dengan total nilai Rp 52.000.000
16. Digital Thermohygrometer Jumbo Display sebanyak 2 buah dengan total nilai Rp 2.900.000
17. Refractometer 3810 Digital Pocket sebanyak 1 buah dengan total nilai Rp 8.900.000
18. Grain Moisture Meter Portable sebanyak 2 buah dengan total nilai Rp 30.000.000
19. Mikroskop Binokular Elektrik XSZ 107BN sebanyak 1 buah dengan nilai Rp 7.000.000
20. Portable Leaf Area Meter Plant Tester sebanyak 1 buah dengan nilai Rp 44.500.000
21. Tabung Reaksi ukuran 16x150 mm sebanyak 1 buah dengan nilai Rp 1.450.000
22. Mesin Pelet Cetak Pakan Ikan/Ternak MPM 120 Mahkota sebanyak 1 buah dengan nilai Rp 8.650.000
23. Mesin Grinding Mill/Penepung Biji-bijian sebanyak 1 buah dengan nilai Rp 24.250.000
24. Machine Seed Divider Centrifuge/Mesin Pembagi Biji-bijian sebanyak 1 buah dengan nilai Rp 42.950.000
25. Mesin Pemisah Biji Cabai Otomatis sebanyak 1 buah dengan nilai Rp 20.000.000
26. Germinator Elektrik (Germinator Pembenihan) sebanyak 2 buah dengan total nilai Rp 160.000.000
27. Elektrik Desikator/Elektrik Dry Cabinet Vertical sebanyak 1 buah dengan nilai Rp 19.250.000
28. Oven UN260 Universal Oven Drying sebanyak 2 buah dengan nilai Rp 150.500.000

Mutasi transaksi pengurangan peralatan mesin berupa:

- Adanya reklasifikasi masuk, reklasifikasi keluar, perolehan lainnya dan koreksi pencatatan disebabkan karena kesalahan pencatatan pada modul komitmen pada belanja Cawan Sampel Aluminium 55 mm yang seharusnya sebanyak 2 buah, tetapi dicatat menjadi 1 buah sehingga kesalahan tersebut telah diperbaiki pada Modul BMN.

Gedung dan Bangunan
Rp19.260.926.912

C.5. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp19.260.926.912 dan Rp19.043.919.990. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	19.043.919.990
Mutasi tambah:	
Pembelian	17.504.700
Pengembangan Nilai Aset	199.502.222
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	17.504.700
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan	17.504.700
Saldo per 31 Desember 2023	19.260.926.912
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(2.847.954.785)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	16.412.972.127

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berupa:

1. Pengembang nilai aset sebesar Rp 199.502.222 berupa rehab pagar IP2TP Banjarbaru
2. Koreksi pencatatan kuantitas sebesar Rp 17.504.700 merupakan penambahan nilai aset berupa belanja honor pengawas rehab pagar IP2TP Banjarbaru

Mutasi transaksi pengurangan Gedung dan Bangunan berupa:

- Koreksi pencatatan sebesar Rp 17.504.700 disebabkan kesalahan pencatatan kode barang pada Modul Komitmen dan telah dilakukan perbaikan di Modul BMN menjadi kode barang yang sesuai

*Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp5.012.037.020*

C.6. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp.5.012.037.020 dan Rp.4.794.830.600. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	4.794.830.600
Mutasi tambah:	
Pembelian	17.504.700
Pengembangan Nilai Aset	199.701.720
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	17.504.700
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan	17.504.700
Saldo per	5.012.037.020
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(1.288.632.502)
Nilai Buku per	3.723.404.518

Mutasi transaksi penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

1. Pengembang nilai aset sebesar Rp 199.701.720 berupa rehab jalan kompleks IP2TP
2. Koreksi pencatatan kuantitas sebesar Rp 17.504.700 merupakan penambahan nilai aset berupa belanja honor pengawas rehab jalan kompleks IP2TP Banjarbaru

Mutasi transaksi pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

- Koreksi pencatatan sebesar Rp 17.504.700 disebabkan kesalahan pencatatan kode barang pada Modul Komitmen dan telah dilakukan perbaikan di Modul BMN menjadi kode barang yang sesuai

*Aset Tetap Lainnya
Rp98.082.767*

C.7. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp.98.082.767 dan Rp.98.082.767. Aset tetap tersebut . Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	98.082.767
Mutasi tambah:	
Mutasi Kurang:	
Saldo per 31 Desember 2023	98.082.767
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	98.082.767

*Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Rp15.630.478.756*

C.8. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp15.630.478.756 dan Rp14.958.137.389. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Semester II Tahun 2023

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	12.867.080.078	(11.493.891.469)	1.373.188.609
2	Gedung dan Bangunan	19.260.926.912	(2.847.954.785)	16.412.972.127
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.012.037.020	(1.288.632.502)	3.723.404.518
4	Aset Tetap Lainnya	98.082.767	-	98.082.767
Akumulasi Penyusutan		37.238.126.777	(15.630.478.756)	21.607.648.021

Aset Tak Berwujud
Rp13.372.790

C.9. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp13.372.790 dan Rp19.487.790. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada BPSIP Kalimantan Selatan berupa Software.

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai per 1 Januari 2023	19.487.790
Mutasi tambah:	
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan	6.115.000
Saldo Nilai per 31 Desember 2023	13.372.790
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2023	(13.372.790)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	-

Mutasi transaksi penambahan/pengurangan Aset Tak Berwujud sebagai berikut :

- Mutasi pengurangan Aset Tak Berwujud berupa software sebesar Rp 6.115.000, karena adanya penambahan nilai yang disebabkan normalisasi pada tahun sebelumnya, sehingga telah dilakukan koreksi pencatatan di Modul BMN

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya 13.372.790

C.10. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp13.372.790 dan Rp19.487.790. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Tak Berwujud	13.372.790	(13.372.790)	-
Total	13.372.790	(13.372.790)	-

Utang kepada Pihak Ketiga Rp2.500.000

C.11. Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.500.000 dan Rp2.500.000. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A.2022
Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	2.500.000	2.500.000
Total	2.500.000	2.500.000

Penjelasan tentang Utang kepada Pihak Ketiga :

Merupakan Beban PDAM di Bulan Desember 2023 yang harus dibayarkan pada tahun berikutnya

Ekuitas
Rp130.242.271.562

C.12. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp130.242.271.562. dan Rp129.880.904.587. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan Negara
Bukan Pajak
Rp136.349.772

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp136.349.772 dan Rp248.115.804. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 45,05. Rincian Pendapatan tersebut adalah sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Semester II TA 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022	%
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	1.590.000	4.080.000,00	(61,03)
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	-	5.000.000,00	(100,00)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	7.614.372	8.186.304,00	(6,99)
Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	-	2.200.000,00	(100,00)
Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek	127.145.400	228.649.500,00	(44,39)
Jumlah	136.349.772,00	248.115.804,00	(45,05)

Realisasi PNBPN pada LO senilai Rp 136.349.772 berbeda dengan LRA senilai Rp 138.924.778. Terjadi selisih senilai Rp 2.575.006 disebabkan pada pencatatan di LRA akun 425911 Pendapatan Kembali Belanja Pegawai TAYL dimasukkan dalam menu PNBPN, sedangkan pada pencatatan di LO akun tersebut masuk pada menu Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sehingga selisih tersebut hanya disebabkan perbedaan pada menu pencatatan saja.

Beban Pegawai
Rp3.962.459.815

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.962.459.815 dan Rp4.875.652.988.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.. Beban Pegawai Tahun 2023 sebesar 18,73 persen dibandingkan dengan Tahun 2022. Rincian Beban Pegawai Semester II Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai Semester II TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Gaji Pokok PNS	2.587.595.900	3.195.890.100	(19,03)
Beban Pembulatan Gaji PNS	36.714	44.926	(18,28)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	212.838.980	249.823.930	(14,80)
Beban Tunj. Anak PNS	55.434.614	61.731.046	(10,20)
Beban Tunj. Struktural PNS	13.860.000	25.200.000	(45,00)
Beban Tunj. Fungsional PNS	236.070.000	397.885.000	(40,67)
Beban Tunj. PPh PNS	13.677.187	22.436.046	(39,04)
Beban Tunj. Beras PNS	150.488.760	174.314.940	(13,67)
Beban Uang Makan PNS	362.472.000	444.160.000	(18,39)
Beban Tunjangan Umum PNS	75.775.000	90.075.000	(15,88)
Belanja Gaji Pokok PPPK	34.320.800	-	-
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	804	-	-
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	1.058.880	-	-
Belanja Tunjangan Anak PPPK	211.776	-	-
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	3.120.000	-	-
Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.448.400	-	-

Belanja Uang Makan PPPK	7.684.000	-	-
Beban Uang Lembur	206.366.000	214.092.000	(3,61)
Jumlah	3.962.459.815	4.875.652.988	(18,73)

Tidak ada perbedaan realisasi belanja pegawai pada pencatatan di LRA dengan LO, total belanja pegawai di Tahun 2023 sebesar Rp 3.962.459.815.

*Beban Persediaan
Rp169.209.290*

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp169.209.290 dan Rp790.736.000

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 78,60 persen dibandingkan dengan Tahun 2022. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Semester II TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Persediaan konsumsi	169.209.290	786.325.000	(78,48)
Beban Persediaan bahan baku	-	2.968.000	(100,00)
Beban Persediaan Lainnya	-	1.443.000	(100,00)
Jumlah Beban Persediaan	169.209.290	790.736.000	(78,60)

Realisasi beban persediaan pada LO senilai Rp 169.209.290 berbeda dengan nilai transaksi keluar pada menu persediaan di aplikasi SAKTI sebesar Rp 171.383.090. Terjadi selisih senilai Rp 2.173.800 merupakan SPM 00025 dan 00026 yang tidak berlanjut sampai dengan SPBy, tetapi telah dicatat pada menu persediaan. Sehingga kesalahan tersebut telah diperbaiki menggunakan menu modul GLP dan telah dibuat jurnal koreksi dengan nilai tersebut.

*Beban Barang dan Jasa
Rp2.493.622.780*

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.493.622.780 dan Rp1.945.662.700.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 28,16 persen dibandingkan dengan Tahun 2022. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Semester II TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Keperluan Perkantoran	986.876.530	1.014.714.700	(2,74)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	143.620.000	143.180.000	0,31
Beban Barang Operasional Lainnya	237.510.000	47.500.000	400,02
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	6.366.500	9.981.200	(36,22)
Beban Bahan	672.974.100	100.766.000	567,86
Beban Honor Output Kegiatan	29.950.000	37.550.000	(20,24)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	80.275.000	303.675.400	(73,57)
Beban Langganan Listrik	203.943.150	198.760.300	2,61
Beban Langganan Telepon	33.041.850	38.576.150	(14,35)
Beban Langganan Air	50.560.950	39.369.950	28,43
Beban Jasa Profesi	31.000.000	11.000.000	181,82
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	589.000	(100,00)
Beban Aset Ekstrakomtabel Jalan, Irigasi dan Jaringan	17.504.700	-	-
Jumlah	2.493.622.780	1.945.662.700,00	28,16

Tidak ada perbedaan realisasi belanja barang dan jasa pada pencatatan di LO dengan Neraca Percobaan Kas, total beban barang dan jasa di Tahun 2023 sebesar Rp 2.493.622.780.

Beban Pemeliharaan
Rp590.967.040

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp590.967.040 dan Rp564.836.450.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 4,63 persen dibandingkan dengan Tahun 2022 Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Semester II TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	309.911.890	317.923.600	(2,52)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	281.055.150	246.912.850	13,83
Jumlah	590.967.040	564.836.450	4,63

Tidak ada perbedaan realisasi belanja pemeliharaan pada pencatatan di LO dengan Neraca Percobaan Kas, total beban pemeliharaan di Tahun 2023 sebesar Rp 590.967.040.

Beban Perjalanan Dinas
Rp898.011.050

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp898.011.050 dan Rp855.232.800

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 5,00 persen. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan 2022 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Semester II TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Perjalanan Biasa	896.031.050	823.252.800	8,84
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.980.000	1.980.000	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	30.000.000	(100,00)
Jumlah	898.011.050,00	855.232.800	5,00

Tidak ada perbedaan realisasi belanja perjalanan dinas pada pencatatan di LO dengan Neraca Percobaan Kas, total beban perjalanan dinas di Tahun 2023 sebesar Rp 898.011.050.

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp672.341.367

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp672.341.367 dan Rp1.484.211.216.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Semester II TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	290.541.800	720.612.087	(59,68)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	263.515.703	527.031.400	(50,00)
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	34.489.056	68.978.112	(50,00)
Beban Penyusutan Irigasi	82.315.228	164.630.457	(50,00)
Beban Penyusutan Jaringan	1.479.580	2.959.160	(50,00)
Jumah Penyusutan	672.341.367	1.484.211.216	(54,70)
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah	672.341.367	1.484.211.216	(54,70)

Surplus (Defisit)
Penjualan Aset Non
Lancar Rp-159.570.000

D.8. Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp-159.570.000 dan Rp-88.677.500

Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Semester II TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Kerugian Pelepasan Aset	(159.570.000)	(88.677.500)	80
Jumlah	(159.570.000,00)	(88.677.500)	80

Beban kerugian pelepasan aset sebesar Rp 159.570.000 merupakan nilai persediaan UPBS yang telah dikeluarkan.

Surplus (Defisit) dari
Kegiatan Non
Operasional Lainnya
Rp92.690.006

D.9. Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp92.690.006 dan Rp87.061.626.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Semester II TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	2.575.006	-	-
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	90.115.000	85.125.000,00	6
Jumlah	92.690.006,00	85.125.000	8,89

Pendapatan perolehan aset lainnya sebesar Rp 90.115.000 merupakan nilai persediaan UPBS yang masuk pada Semester 2 Tahun 2023, dan penerimaan kembali beban pegawai TAYL berupa pengembalian tunjangan peneliti an. Shinta Anggreany, SP, M.Si sebesar Rp 2.575.006.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp129.880.904.587,00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.129.880.904.587,00 dan Rp.131.251.150.018,00

Defisit LO Rp.-
8.717.141.564,00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp.-8.717.141.564,00 dan Rp.-10.269.832.224,00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan
Mendasar Rp.0,00

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas tahun pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.14.904.700 dan Rp.-2.431.715 yaitu sebagai berikut .

Koreksi Aset Tetap Non
Revaluasi Rp14.904.700

E.4.1 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.14.904.700 dan Rp.-2.431.715.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2023

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	14.904.700
Jumlah	14.904.700,0

Transaksi Antar Entitas
Rp9.063.603.839

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.9.063.603.839 dan Rp.8.900.217.508. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun 2023

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	9.202.528.617
Diterima dari Entitas Lain	(138.924.778)
Jumlah	9.063.603.839

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DKEL sebesar Rp 9.202.528.617, sedangkan DDEL sebesar Rp 138.924.778

Ekuitas Akhir
Rp130.242.271.562

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.130.242.271.562,00 dan Rp.129.879.103.587,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

A. Realisasi Akun Pandemi COVID-19

Pengalokasian belanja barang untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp 8.467.000,00. Belanja tersebut terserap sebesar Rp 8.466.500,00 atau mencapai 99,99% dari alokasi anggaran dengan rincian sebagai berikut :

*Rincian realisasi anggaran belanja dalam rangka Covid-19
Per 31 Desember 2023*

Akun	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	6.367.000	6.366.500	99,99
521841	Beban Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	2.100.000	2.100.000	100,00
Jumlah		8.467.000	8.466.500	99,99